

# Membangun Postur TNI Ideal

*Connie Rahakundini Bakrie*



**P**idato Benny Moerdani dalam Kursus Athan RI di Bogor pada tahun 1991 sudah menyinggung bagaimana kaitan antara Postur ABRI yang harus dibangun berhadapan dengan kendala keterbatasan. Disampaikannya bahwa organisasi ABRI harus sederhana dan ramping dengan diisi oleh personil yang terdidik dan profesional tetapi perlu didukung oleh tingkat teknologi yang memadai.

Dalam mewujudkan Postur TNI dengan segala keterbatasan anggaran yang dihadapi (dan hingga hari ini masih dihadapi), maka diperlukan penajaman prioritas kemampuan intelijen strategis, mencakup kemampuan teritorial dengan seluruh kemampuan sosial politik dan profesionalisme di setiap bidang sehingga tercapai ketajaman kekuatan pemukul yang mampu bereaksi dengan tepat dan cepat.

Pembangunan profesionalisme TNI sejak awal reformasi tahun 1999 menuju de-

mokratisasi di Indonesia, sampai saat ini masih banyak menemui hambatan. Walaupun TNI telah menyatakan tekad kuatnya untuk menjadi militer profesional yang berfungsi sebagai alat pertahanan negara, namun masalah hubungan sipil-militer di Indonesia tidak dengan serta-merta dapat terselesaikan. Hubungan sipil-militer, bagaimana pun juga akan menimbulkan konsekuensi yang harus dipenuhi oleh kedua pihak. Tidak dapat dipungkiri bahwa sipil pada dasarnya membutuhkan militer untuk menjaga wilayah dan kedaulatan negara. Di sisi lain, militer juga membutuhkan dukungan sipil atas persoalan alokasi anggaran dalam rangka mengatasi berbagai ancaman yang timbul.

Terbatasnya kemampuan pemerintah sipil memenuhi kebutuhan anggaran TNI yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan prajurit maupun perbaikan dan peningkatan kualitas serta kuantitas alutsista, juga merupakan salah satu konsekuensi dari pembangunan profesionalisme militer yang sampai saat ini belum sepenuhnya dapat dipenuhi sipil. Bahkan, prosedur penurunan anggaran TNI pun masih harus melalui proses birokrasi yang panjang. Akibatnya,

instruksi anggaran TNI yang telah ditetapkan sebelum tahun anggaran berjalan, dalam pelaksanaannya terlambat tiga sampai empat bulan.

Setitik harapan, kemudian muncul di kalangan TNI seiring dengan komitmen sipil menaikkan gaji prajurit sampai 20% dan berbagai rencana perbaikan kesejahteraan TNI, serta disepakatinya kerjasama pengadaan persenjataan dengan Rusia melalui pinjaman negara (*state credit*) yang dapat dipakai untuk membeli berbagai alutsista yang dibutuhkan TNI.

Optimisme itu akhirnya harus berhadapan dengan kenyataan kondisi ekonomi global yang tak mendukung. Setelah kasus *subprime mortgage* yang terjadi di Amerika Serikat dan meluas ke seluruh dunia, tak terkecuali, imbas *financial crisis* ini juga sampai ke Indonesia, sekarang harga minyak dunia terus melambung, yang mencapai lebih dari US\$ 130 per barrel. Apa akibatnya? Penghematan anggaran TNI. Faktanya, hal ini telah diungkapkan oleh Mabes TNI (*Koran Tempo*, 12/04/2008) sebagai sikap atas mahalnya kebutuhan pertahanan karena melambungnya harga minyak. Akibatnya, akan terjadi pengurangan jenis alutsista dan yang le-

bih mengkhawatirkan lagi jika yang dikurangi adalah jenis alutsista strategis yang berkaliber besar tanpa adanya rencana untuk menambah jumlah jenis alutsista yang dipilih. Pilihan atas jenis alutsista dan besar kecilnya kaliber senjata yang digunakan, pada akhirnya juga akan berujung pada banyak hal.

Salah satunya adalah pilihan *supplier* senjata TNI, AS atau Russia? Menurut laporan CRS (*Congressional Research Service*, 2004) Sejak tahun 2000-an, Rusia menempati urutan kedua sebagai eksportir senjata ke negara-negara berkembang setelah Amerika Serikat. Sedangkan di Asia sendiri, Rusia menempati urutan pertama dengan pangsa pasar sebesar 48,8% atau senilai US\$ 16,5 miliar pada tahun 2003 (*Conventional Arms Transfer to Developing Nations, 1996-2003*). Keunggulan Rusia dalam menjual senjata di pasar Asia ini karena diberlakukannya kebijakan yang fleksibel dan kreatif dengan menyediakan berbagai pilihan pembiayaan dan pembayaran yang realistis bagi para kliennya yang dipandang prospektus, seperti Indonesia. Di sisi lain, kedua negara ini sering kali "bertarung" untuk mendapatkan supremasi kontrol dunia.

Di luar semua itu, masih banyak pekerjaan rumah TNI yang perlu diselesaikan. Namun, hal yang terpenting bukanlah semata-mata persoalan mana senjata yang perlu diganti dan mana yang masih layak untuk dipakai. Lebih dari itu, dalam membangun TNI yang profesional dan berwibawa di mata internasional, diperlukan sebuah *grand design* Postur TNI yang ideal. Kita semua tahu bahwa ideal berbeda dengan kenyataan. Namun demikian, tanpa idealisme, kita tidak akan pernah tahu ke mana tujuan TNI dan bagaimana TNI yang kita cintai harus dibangun. Bagaimanapun juga, idealisme sangat dibutuhkan sebagai panduan dalam mencapai cita-cita pembangunan Postur TNI yang kuat, berwibawa, dan profesional.

### *Grand Design* Postur TNI Ideal

Sebagai alat negara yang bertujuan menjaga eksistensi bangsa di mata dunia internasional, tugas sipil harus membuat militer menjadi profesional dan disegani melalui Postur TNI yang kuat dan berteknologi tinggi. Guna membangun Postur TNI yang kuat dan mekanisme kerjasama antar angkatan yang efisien dan efektif

yang dibangun secara terintegrasi dari seluruh kekuatan TNI, baik AD, AL, dan AU, terdapat dua hal yang perlu diperhatikan berdasarkan pemikiran Michael Leifer yang tertuang dalam tulisan Alan Chong, "The Security of Maritime Thoroughfares" (2006), yaitu keamanan laut harus dianalisis dari sudut pandang politik darat mengingat bahwa konflik laut berawal dari basis kedaulatan suatu negara yang berada di atas daratan. Kedua, berdasarkan strategis geografi Indonesia, maka harus meletakkan kepentingan internasional dalam menganalisis keamanan Asia Tenggara.

Secara ideal, dengan mempelajari luasnya wilayah daratan, lautan dan udara, serta daerah perbatasan dengan negara tetangga yang dihadapkan pada potensi ancaman, gelar kekuatan TNI dapat dibagi ke dalam empat wilayah

pertahanan, sebagai berikut; Kowilhan I bermarkas di Jakarta, Kowilhan II bermarkas di Medan, Kowilhan III bermarkas di Samarinda dan Kowilhan IV bermarkas di Jaya Pura. Secara umum, kekuatan TNI AD yang ideal harus menggelar sebanyak 816 batalion tempur dan teritorial, 4 divisi terpusat (Kostrad dan Kopassus) serta 16 skuadron heli-serbu dan heli-angkut. Sedangkan kekuatan TNI AL yang ideal menggelar sebanyak 14 skuadron tempur (KRI), 42 skuadron terbang (KAL) yang berada dalam 4 kapal induk, 4 *strategic section* dengan kekuatan 14 kapal selam di mana 4 unit diantaranya *strategic submarine* serta 14 brigade marinir. Terakhir, kekuatan TNI AU yang ideal menggelar 140 skuadron tempur, 7 skuadron bomber, 27 satuan pertahanan udara, 40 satuan radar, dan 1 satuan *strategic missile*.

TNI	Gelar Kekuatan Ideal Kowilhan IV	Gelar Kekuatan Ideal Kowilhan IV	Gelar Kekuatan Ideal Kowilhan IV	Gelar Kekuatan Ideal Kowilhan IV	
TNI AD	10 Brig Teritorial 1 Brig Perbatasan 9 Divisi Tempur 4 Divi Terpusat	30 Yonif 10 Yonkav 10 Yonamed 10 Yonhanudni 81 Yonif 27 Yonkaw 27 Yonarmed 27 Yonhanudni 2 Sku Heli-Serbu 2 Sku Heli-Angkut Kostrad dan Kopassus	9 Brig Teritorial 3 Brig Perbatasan 8 Divisi Tempur 72 Yonif 24 Yonkaw 24 Yonarmed 24 Yonhanudni 2 Sku Heli-Serbu 2 Sku Heli-Angkut	10 Brig Teritorial 4 Brig Perbatasan 8 Divisi Tempur 38 Yonif 10 Yonkaw 10 Yonarmed 10 Yonhanudni 72 Yonif 24 Yonkaw 24 Yonarmed 24 Yonhanudni 2 Sku Heli-Serbu 2 Sku Heli-Angkut	8 Brig Teritorial 4 Brig Perbatasan 9 Divisi Tempur 24 Yonif 8 Yonkaw 8 Yonarmed 8 Yonhanudni 81 Yonif 27 Yonkaw 27 Yonarmed 27 Yonhanudni 2 Sku Heli-Serbu 2 Sku Heli-Angkut
TNI AL	2 Flotila 1 Strat Section 2 Brig Marinir	2 Sku Tempur 1 Sku Support 6 Sku Terbang 2 Sku Support 1 SSBN, 1 SSN 6 Yonif 2 Yonarmed 2 Sku Heli-serbu	4 Flotila 1 Stra Section 4 Brig Marinir 4 Sku Tempur 1 Sku Support 12 Sku Terbang 4 Sku Support 1 SSBN, 3 SSN 12 Yonif 4 Yonarmed 4 Sku Heli-serbu	4 Flotila 1 Stra Section 4 Brigade Marinir 4 Sku Tempur 1 Sku Support 12 Sku Terbang 4 Sku Support 1 SSBN, 3 SSN 12 Yonif 4 Yonarmed 4 Sku Heli-serbu	4 Flotila 1 Strat Section 4 Brigade Marinir 4 Sku Tempur 1 Sku Support 12 Sku Terbang 4 Sku Support 1 SSBN, 3 SSN 12 Yonif 4 Yonarmed 4 Sku Heli-serbu
TNI AU	2 Wing Udara 8 Sat Hanud 10 Sat Radar Stra Spec Force	4 Sku Inas 32 Sku Tempur 4 Sku Heli-serbu 4 Sku Support 6 Sku Angkut 2 Sku Bomber 1 Missile Unit	1 Wing Udara 7 Sat Hanud 10 Sat Radar Stra Spec Force 1 Sku Bomber 2 Sku Inas 16 Sku Tempur 2 Sku Heli-serbu 2 Sku Support 2 Sku Angkut	1 Wing Udara 7 Sat Hanud 10 Sat Radar Stra Spec Force 1 Sku Bomber 2 Sku Inas 16 Sku Tempur 2 Sku Heli-serbu 2 Sku Support 2 Sku Angkut	1 Wing Udara 7 Sat Hanud 10 Sat Radar Stra Spec Force 1 Sku Bomber 2 Sku Inas 16 Sku Tempur 2 Sku Heli-serbu 2 Sku Support 2 Sku Angkut

Di sisi lain, sejak tahun 1965-2000, tulisan Michael Leifer selalu dikaitkan dengan Singapura, terutama menyoroti persoalan hubungan Singapura, Indonesia dan Malaysia, serta perannya di ASEAN dan kepentingan mengamankan kedaulatan perairannya. Menurut Tim Huxley, Singapura sebagai negara kota harus memiliki posisi tawar di Asia Tenggara, terutama dengan dua negara besar yang mengapitnya, Indonesia dan Malaysia. Maka, SAF (*Singapore Armed Forces*) harus kuat dan memiliki kredibilitas di Asia Tenggara, tidak sebatas untuk mendukung kepentingan politik Singapura, namun juga menjaga keamanan regional. Maka, sejak tahun 1990, kebijakan luar negeri Singapura dibangun secara luas sebagai bentuk *soft politics* yang didasarkan pada kekuatan ekonomi, teknologi, dan militer serta keterlibatannya secara penuh dalam semua aktivitas PBB dan berbagai institusi internasional lainnya. Berangkat dari kondisi ini dan juga mengetahui bahwa Indonesia adalah negara terbesar di Asia Tenggara, maka, setidaknya, TNI harus memiliki postur yang identik dengan SAF, dengan kapasitas alutsista, SDM, dan anggaran yang disesuaikan dengan cakupan wilayah dan kondisi demografis

Indonesia berdasarkan karakter setiap angkatan dengan memperhatikan pula fakta atas keseimbangan kekuatan militer di Asia Tenggara dan Asia Pasifik.

### Postur Ideal TNI AD

Basis kekuatan AD adalah jumlah personil, di mana kelengkapan persenjataan hanya berfungsi sebagai alat dukung. Dengan memahami perbedaan karakter tersebut, dalam merumuskan jumlah prajurit dan alutsista AD secara ideal berdasarkan perimbangan kekuatan militer di Asia Pasifik, dapat ditentukan terlebih dahulu jumlah personilnya, baru dihitung jumlah Alutsistanya. Mengingat bahwa basis keahlian AD adalah di darat, maka penentuan jumlah prajurit AD idealnya harus dibandingkan dengan jumlah penduduk. Semakin kecil jumlah penduduk yang mampu dijaga oleh seorang prajurit AD, semakin tinggi efektivitasnya.

Kembali memahami konsepsi postur ideal TNI AD yang menggelar kekuatan 816 batalion tempur dan teritorial, 4 divisi terpusat (Kostrad dan Kopassus) serta 16 skuadron heliserbu dan heli-angkut, dapat dihitung

kebutuhan jumlah prajurit. Berdasarkan standar IISS (*International Institute for Strategic Studies*, 2005), kekuatan satu batalion sebesar 500-800 personil. Jadi, jumlah personil tempur TNI AD yang dibutuhkan 748.800 prajurit. Jumlah ini belum termasuk 26.000 orang bantuan administrasi, 6 Yonif pasukan perdamaian (6.000 personil) dan staf 12 Koter (72.000 personil). Sehingga, total personil TNI AD sebanyak 852.500. Berdasarkan data per-Oktober 2005, jumlah personil TNI AD sudah mencapai 276.052. Maka, dibutuhkan lagi tambahan sekitar tiga kali lipat.

Pengukuran efektifitas prajurit dalam meng-cover penduduk dapat dipertimbangkan dengan melihat rata-rata Asia Pasifik (365 penduduk). Dengan kekuatan personil AD sebanyak 852.500 untuk mampu meng-cover penduduk sebesar itu, maka jumlah penduduk Indonesia harus sekitar 311 juta jiwa. Berdasarkan data WHO tahun 2000, diketahui jumlah penduduk Indonesia mencapai 212 juta dan sudah meningkat sekitar 30 juta pada tahun 2006. Artinya, terjadi rata-rata peningkatan sebesar 2,3% per tahun. Maka, jumlah penduduk sebesar 311 juta jiwa akan dicapai pada sepuluh tahun ke

depan. Perhitungan ini, membuat TNI AD tidak mungkin memenuhi jumlah 576.448. Hitungan terbaik dapat didasarkan pada jumlah penduduk 30 tahun mendatang, di mana efektifitas TNI dalam meng-cover penduduk pada saat itu diprediksikan akan menjadi sebesar 560 orang. Hitungan ini mengasumsikan bahwa TNI AD harus mampu merekrut sekitar 10.750 orang per tahun.

Lebih lanjut, dalam merumuskan jumlah dan jenis alutsista TNI AD yang ideal, dapat dihitung dengan cara membandingkan kekuatan alutsista AD di Asia Pasifik dan Singapura khususnya serta rumusan postur TNI ideal yang terbagi dalam 4 Kowilhan. Perbandingan didasarkan pada kategori utama persenjataan, seperti tank, ACV (*Armoured Combat Vehicle*) dan artileri, mengingat bahwa tidak semua AD di Asia Pasifik dilengkapi dengan pesawat tempur maupun kapal perang.

Alutsista AD pertama adalah tank. Jika dilihat dari perbandingan jumlah tank dengan jumlah prajurit, dapat diartikan bahwa semakin kecil jumlah prajurit yang mampu di-cover oleh satu unit tank, akan semakin besar kekuatan AD-nya. Berdasarkan

rumusan ini, diperoleh jumlah tank ideal untuk TNI AD sebesar 6.800 unit. Saat ini, TNI AD sudah memiliki 350 unit, maka dibutuhkan 6.450 unit lagi. 6.800 tank ini akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan persenjataan di 147 Yonkav, di mana MBT hanya digunakan oleh 72 Yonkav (tempur, teritorial dan perbatasan) di Kowilhan III (Kalimantan) dan Kowilhan IV (Irian Jaya) saja. Lebih lanjut, hitungan besaran waktu untuk memenuhi kekurangan jumlah tank jika didasarkan pada 30 tahun kedepan seperti perhitungan jumlah prajurit, maka dalam satu tahun, TNI AD harus mampu membeli tank rata-rata sebanyak 215 unit.

Alutsista AD selanjutnya adalah ACV (*Armoured Combat Vehicle*). Komposisi ACV yang idealnya dimiliki TNI AD, berdasarkan hasil hitungan adalah; *Recce* sebanyak 1.200 unit, AIFV (*Armoured Infantry Fighting Vehicle*) 6.000 unit, dan APC (*Armoured Personnel Carrier*) 16.200 unit. Mengingat bahwa TNI AD saat ini memiliki *Recce* 142 unit, maka dibutuhkan tambahan 1.058 unit lagi, untuk AIFV masih dibutuhkan sebanyak 5.989 unit, dan APC dibutuhkan 15.844 unit lagi. Jadi, total kebutuhan ACV dibandingkan de-

ngan kondisi nyata sebesar 22,891 unit. Sejumlah 23.400 unit ACV ini akan digunakan melengkapi kebutuhan persenjataan di 294 batalion TNI AD yang terdiri dari Yonkav, Yonarmed, dan Yon Arhanudri, termasuk juga didalamnya Kostrad dan Kopassus, sesuai dengan rancangan strategis postur TNI AD yang telah dijelaskan di muka. Sedangkan jika dilihat dari besaran waktu pemenuhan kebutuhan yang dihitung 30 tahun mendatang, maka dalam satu tahun TNI AD harus mampu membeli *Recce* rata-rata sebesar 36, AIFV 200 dan APC sekitar 530 unit.

Kemampuan artileri TNI AD harus mencapai kemampuan dukung paling tidak 75 prajurit per-artileri. Sehingga, dibutuhkan artileri sebanyak 9.985. Mengingat bahwa TNI AD saat ini telah memiliki artileri T dengan kaliber 105mm sebanyak 130 unit, maka dibutuhkan tambahan sebanyak 1.060 unit dan kaliber 155 mm sebesar 5.800 unit. Sedangkan SP dengan kaliber 155mm tetap membutuhkan 1.000 unit, karena sejauh ini TNI belum memiliki tipe artileri ini. Kemudian, untuk kategori mortir dengan kaliber 120mm, membutuhkan tambahan sebanyak 905 unit, mengingat TNI AD sudah

memiliki tipe sejenis sebanyak 75 unit, sedangkan mortir berkaliber 160mm tetap dibutuhkan sebanyak 1.000 unit. Jika dilihat dari besaran waktu pencapaian yang dihitung 30 tahun mendatang, maka per-tahun TNI AD harus mampu membeli artileri rata-rata; untuk jenis T kaliber 105mm sebanyak 36, T kaliber 155mm sebanyak 195 unit, SP kaliber 155mm sebesar 35 unit, mortir kaliber 120mm sebanyak 32 unit, dan mortir kaliber 160mm sebanyak 35 unit.

**Rekapitulasi Kebutuhan Alutsista Ideal TNI AD  
dan Rata-rata Pengadaan per-Tahun Selama Kurun 30 Tahun Mendatang**

1	2	3	4	5	6
1	Tank	MBT	<i>Centurion AVRE</i>	1.800	60,0
		LT	<i>Scorpion</i>	4.650	155,0
2	ACV	Recce	<i>AMX-10 PAC 90</i>	1.058	29,3
		AIFV	<i>IFV-40/AMX-10</i>	5.989	199,6
		APC	<i>M-113V-Commendo</i>	15.844	528,1
3	Artileri	Towed	105mm	1.060	35,3
			155mm	5.800	193,3
		Self Propelled	155mm	1.000	33,3
		Mortir	<i>M-113 (120mm)</i>	905	30,1
			<i>M-58 Tampella (160mm)</i>	1.000	33,3
4	<b>TOTAL JUMLAH</b>			<b>39.106</b>	<b>1.297,3</b>

Keterangan Tabel: 1. Nomer; 2. Kategori Persenjataan; 3. Jenis Senjata; 4. Tipe Senjata dan/atau Kaliber; Senjata; 5. Jumlah Kekurangan/Kebutuhan; 6. Jumlah Rata-rata Pengadaan Kebutuhan Persenjataan per-Tahun

### Postur Ideal TNI AL

Kekuatan TNI AL prinsipnya berbasis pada teknologi alutsista. Mengingat ada perbedaan organisasi antara RSN (*Republic of Singapore Navy*) dengan TNI AL, maka penghitungan Postur TNI AL yang ideal akan didasarkan perbandingan kekuatan nyata AL di Asia Pasifik di samping

juga memperhatikan rumusan pembagian 4 Kowilhan. Mengingat juga bahwa tidak semua Alutsista AL dimiliki oleh negara-negara Asia Tenggara dan fakta perbedaan pengorganisasian militer yang berakibat pada kewenangan penggunaan jenis alutsista dari setiap angkatan, maka

dalam konteks perumusan alutsista TNI AL yang ideal, secara umum hanya akan didasarkan pada persenjataan dasar utama yang harusnya dimiliki AL, seperti; kapal selam, perang, patroli, dan kapal pendukung.

Tidak semua negara Asia Tenggara memiliki kapal selam. Dari sepuluh negara hanya tiga negara yang memiliki, Indonesia, Singapura dan Vietnam. Kondisi ini jauh berbeda dibandingkan dengan Asia Pasifik. Jumlah kapal selam terbanyak dimiliki Korea Utara, AS, China dan Russia yang memiliki kapal selam lebih dari 50 unit. Berdasarkan data tersebut dan merujuk pada *grand strategy* dalam membangun TNI yang modern dan berwibawa dengan visi internasional, kebutuhan kapal selam TNI AL yang ideal dapat ditentukan dengan beberapa pertimbangan strategis sebagai berikut; *pertama*, mengingat wilayah laut Indonesia yang luas dan strategis sebagai perairan internasional yang dilalui oleh berbagai kapal dari seluruh dunia dengan membawa serta kepentingannya, sangat berpotensi terjadi konflik. Maka, dengan adanya kapal selam modern, minimal aspek psikologi musuh dapat dipengaruhi. *Kedua*, mengingat strategisnya perairan

laut di sekitar Indonesia, terutama Selat Malaka dan Laut China Selatan juga berpotensi memicu konflik *inter-state*, sehingga dengan melengkapi TNI AL dengan kapal selam modern dan canggih, minimal mampu berjaga-jaga atau bahkan mengantisipasi terjadinya konflik. *Ketiga*, memahami serta melihat fakta perkembangan teknologi kapal selam dan perimbangan kekuatan di Asia Pasifik. Berlandaskan pertimbangan tersebut, maka TNI AL idealnya dilengkapi dengan 10 kapal selam kategori *tactical* dan 4 buah kapal selam berkategori *strategic*. Perhitungan ini juga didasarkan pada pembagian wilayah pertahanan ideal, sehingga satu Komando dapat dilengkapi dengan 4 kapal selam. Mengikuti ukuran yang digunakan dalam memenuhi Alutsista TNI AD, maka dalam dua tahun TNI AL harus mampu membeli atau *up grade* satu kapal selam.

Kekuatan AL juga harus memiliki kapal perang dan kapal patroli. Dalam merumuskan jumlah ideal kapal perang dan kapal patroli berdasarkan pada perimbangan kekuatan militer di Asia Pasifik dan Asia Tenggara serta konsepsi gelar kekuatan TNI ideal, dapat dilakukan dengan cara berbe-

da. *Pertama*, merumuskan jumlah kapal perang yang ideal. Jumlah kapal perang milik TNI AL berdasarkan data sudah di atas rata-rata, baik di Asia Tenggara maupun di Asia Pasifik. Namun, jumlah kapal perang akan disesuaikan dengan kebutuhan skuadron tempur laut di setiap Kowilhan guna mengamankan wilayah laut Indonesia dan juga penambahan jenis kapal. *Kedua*, dalam merumuskan kapal patroli akan didasarkan pada perimbangan jumlah, komposisi maupun spesifikasi dari perbandingan di kawasan Asia Pasifik.

Perumusan kapal perang yang ideal. TNI AL perlu menambah *Destroyer* dan *Cruisier*, sebanyak 14, serta kapal induk 14 unit. Sejumlah kapal perang ini akan digunakan untuk mendukung kekuatan TNI AL di perairan yuridiksi Indonesia berdasarkan pembagian empat Kowilhan, di mana 1 unit kapal induk helikopter akan diposisikan di Selat Malaka. Semua kekuatan akan tergabung dalam 14 *Flotila*, di mana masing-masing *Flotila* membawahi 1 skuadron kapal perang (1 *Cruiser*, 1 *Destroyer*, 2 *Frigate*, dan 7 *Corvette*), 1 skuadron kapal *support*, 3 skuadron terbang dan 1 skuadron *support* dalam satu kapal induk. Dengan demi-

kian, *naval aviation* TNI AL akan diperkuat, mengingat dalam satu kapal induk menampung 15 pesawat tempur jenis FTR (*Fighter*), 30 jenis FGA (*Fighter Ground Attack*), 2 Helikopter SAR, 2 pesawat intai dan 1 pesawat *support*.

Sedangkan untuk perumusan atau penentuan jumlah kapal patroli ideal, didasarkan pada rata-rata Asia Pasifik. Sehingga, idealnya jumlah kapal patroli TNI AL 98 *corvett*. Mengingat saat ini TNI AL sudah memiliki 23, maka dibutuhkan tambahan jumlah sebanyak 75 unit. Berdasarkan waktu pemenuhan kebutuhan PSC dan PCC menuju postur ideal, jika diasumsikan batas waktu sampai 30 tahun mendatang, pelaksanaan pengadaan di bagi menjadi dua tahapan waktu seperti pada proses pengadaan kapal selam. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan *corvette* 70 unit, TNI AL rata-rata per tahun harus mampu membeli 5 unit. Mengingat semakin majunya teknologi perang laut dan terkait juga dengan visi pembangunan industri pertahanan, maka pengadaan kapal selam, kapal perang dan kapal patroli dapat dilakukan dengan mempertimbangkan transfer teknologi.

Kebutuhan ideal alutsista TNI AL juga meliputi kapal pendukung. Kapal pendukung yang dimiliki oleh TNI AL dapat dibedakan menjadi dua kategori, *Amphibious* dan *Logistic and Support*. Berdasarkan data IISS, kapal amfibi yang dimiliki oleh TNI AL sebanyak 26. Kapasitas kapal ini mampu menampung sekitar 17 unit tank dan 200 prajurit. Sebanyak 65 unit lagi kapal *landing* berukuran sedang. Untuk kategori kapal logistik dan pendukung, sampai saat ini TNI AL sudah memiliki 6 kapal *survey*, 2 AO, 2 tanker biasa, 1 *repair ship*, 2 penarik lintas laut, dan 1 *support*.

Mengingat bahwa perumusan kapal perang ideal di ukur dari rata-rata perbandingan Asia Pasifik, maka penentuan jumlah kapal pendukung TNI AL idealnya juga harus berada di atas rata-rata Asia Pasifik. Maka, total jumlah kapal pendukung yang harus dimiliki oleh TNI sebanyak 280 unit. Jumlah ini diperoleh dari perhitungan kebutuhan amfibi bertipe LHD 28 unit (14 brigade infantri marinir – 2000 personil) yang akan ditempatkan di Selat Malaka dan sekitar Pulau Batam sebanyak 8 unit (Kowilhan II), diperairan wilayah tengah dan utara 8 unit (Kowilhan

III), perairan Indonesia Timur sebanyak 8 unit (Kowilhan IV), dan untuk perairan di bawah Kowilhan I sebanyak 4 unit.

Mengingat dibutuhkan 28 kapal *landing* (LCA) per-LHD, maka kebutuhan LCA menjadi sebanyak 280 unit dengan kapasitas 100 prajurit atau 2 tank per-LCA. Kesemua peralatan ini berada di bawah komando marinir. Selain itu, dibutuhkan juga tambahan 10 unit kapal *tanker* yang mampu melakukan pengisian di tengah laut. Terakhir, dibutuhkan tambahan 10 *repair ship*. Jadi total tambahan kapal pendukung 120 unit. Jika ditambah dengan kapal pendukung yang dimiliki oleh TNI AL saat ini, maka jumlahnya menjadi 280 unit. Berdasarkan waktu pemenuhan kebutuhan jumlah kapal pendukung yang ideal dengan digunakan patokan tahun ke-30 sebagai dasar asumsi, maka rata-rata per-dua tahun TNI AL harus mampu membeli 1 unit LHD serta per tiga tahun 1 unit AORH dan 1 unit *Repair Ship* serta 8 unit *craft* (LCA) per tahun.

Total Pasukan TNI AL saat ini sebanyak 55.068 personil dan ada tambahan sebesar 69.000 personil dari marinir dan *naval aviation*. Maka,

jumlah kebutuhan personil menjadi sebanyak 124.068 orang. Sedangkan jumlah tambahan Alutsista TNI AL dari ketiga jenis Alutsista; kapal selam 14 unit, kapal perang (PSC) 42 unit, kapal patroli (PCC) 70 unit, dan kapal pendukung 130 unit, total menjadi 256 unit Alutsista. Jumlah ini tidak memasukkan tambahan Alutsista untuk marinir dan *naval*

*aviation* karena jumlah personil yang mengawakinya sudah terhitung. Maka, guna memenuhi operasional dan perawatan sejumlah Alutsista tersebut dibutuhkan tambahan personil sekitar 15.000 orang. Sehingga, jika ditambah dengan prajurit marinir dan *naval aviation*, total jumlah personil TNI AL yang ideal menjadi 139.068 personil.

Rekapitulasi Jumlah Kebutuhan Alutsista Ideal TNI AL dan Rata-rata Pengadaan per-Tahun Selama Kurun 30 Tahun Mendatang

1	2	3	4	5	6
1	Submarine	Strategic	SSBN-734	4	0,14
		Tactical	(Up-Grade 2 unit Cakra)	10	0,46
2	PSC	CVN	30 FGA, nuclear power	4	0,14
		CV	30 FGA	9	0,30
		CVH	30 ATT	1	0,04
		Cruiser	Aegis Baseline	14	0,46
		Destroyer	AEGIS SAM, LAM	14	0,46
		Corvett	Missile, 76mm	70	3,00
4	Amphibious	LHD	60 MBT, 2000 Person	14	0,46
		Craft	LCA	254	9,00
		AORH	Sea Capable	10	0,34
		Repair Ship	-	10	0,34
5	Tank	MBT	M1A2	420	14,00
		LT	Scorpion	365	13,00
6	Aircraft	FTR	F-16 C/D	210	7,00
		FGA	F/A-18E/F	420	14,00
		Recce	DC-130 Hercules	25	0,83
		Support	CH-53E Sea Stallion	14	0,46
7	Helicopter	ATT	AH-1Z Super Cobra	310	11,00
		ASW	SH-60 Seahawk	281	10,00
		SAR-Heli	U-125A	28	0,94
		Reccs-Heli	Mi-24	28	0,94
8	TOTAL JUMLAH			2.519	87,31

Keterangan Tabel: 1. Nomer; 2. Kategori Persenjataan; 3. Jenis Senjata; 4. Tipe Senjata dan/atau Kaliber; Senjata; 5. Jumlah Kekurangan/Kebutuhan; 6. Jumlah Rata-rata Pengadaan Kebutuhan Persenjataan per-Tahun

## Postur Ideal TNI AU

Berdasarkan data IISS tahun 2005, TNI AU memiliki pesawat tempur sebanyak 44 unit. Jenis FTR yang dimiliki TNI AU sebanyak 26, sedangkan FGA 18 unit. TNI AU juga memiliki 3 pesawat intai dan 62 *transport*. Disisi lain, Singapura dengan luas negara sekitar 648km<sup>2</sup>, memiliki FTR sebanyak 43 dan 44 unit FGA. Di samping itu RSAF juga memiliki 8 pesawat intai, pesawat AEW (*Airborne Warning*) 4 unit, dan pesawat *tanker* 9 unit serta 5 pesawat *transport*. Secara umum total pesawat yang dimiliki oleh TNI AU berjumlah 247 sedangkan RSAF 153 unit.

Walaupun total jumlah pesawat TNI AU di atas RSAF, namun jumlah *Fighter* milik TNI AU hanya sekitar 53% dari RSAF. Jika dibandingkan di Asia Tenggara, jumlah *Fighter* TNI AU berada di posisi keenam, apalagi jika dibandingkan di Asia Pasifik, TNI AU hanya menempati posisi ke-17. Perbandingan jumlah *Fighter* di Asia Pasifik, China menempati urutan teratas, di susul Rusia dan AS. Ketiga negara ini memiliki jumlah *Fighter* di atas 1.000 unit. Rata-rata di Asia Pasifik sebesar 453 unit yang jauh

di atas rata-rata Asia Tenggara (60 unit). Jika dilihat dari rata-rata tersebut, jumlah pesawat *Fighter* TNI AU di bawah rata-rata. Di Asia Pasifik, negara yang berada di atas rata-rata hanya ada enam, selain ketiga negara di atas, ada India, Korea Utara dan Korea Selatan.

Untuk pesawat *bomber*, baik TNI AU maupun RSAF sama-sama tidak memiliki. Berdasarkan data IISS, tidak ada satu pun negara Asia Tenggara yang memiliki. Di Asia Pasifik pun, tidak semua negara memiliki. Tercatat hanya ada enam negara yang memiliki *bomber*, China, Rusia, AS, Korea Utara, Pakistan, dan Australia. Jika dilihat dari besaran total jumlah semua pesawat yang dimiliki negara-negara Asia Tenggara, jumlah semua pesawat TNI AU sebanyak 247, menempati posisi ketiga setelah Thailand dan Vietnam. Rata-rata jumlah pesawat Asia Tenggara 149 unit. Secara umum, jumlah pesawat TNI AU masih berada di atas rata-rata, namun sebagian besar pesawat tersebut hanya berkategori *training*. Jika dibandingkan di Asia Pasifik, TNI AU jauh di bawah rata-rata. Rata-rata jumlah semua pesawat di Asia Pasifik 1.022 unit. Hanya ada lima negara yang di atas jumlah ini, AS, China, Rusia,

Korea Utara dan India. Indonesia sendiri menempati posisi ke-13.

Lalu, bagaimana merumuskan jumlah, komposisi dan spesifikasi pesawat yang ideal bagi TNI AU? Berbagai pertimbangan berikut dapat dijadikan sebagai dasar; *pertama*, memahami bahwa *grand strategy* dalam membangun postur TNI yang ideal didasarkan pada visi internasional, maka rata-rata Asia Pasifik menjadi potokan minimal. *Kedua*, mengingat adanya perbedaan komposisi antar kategori pesawat, di mana, negara Seperti AS lebih berimbang jumlah pesawat per-kategori-nya dibandingkan dengan China maupun Rusia yang memiliki komposisi lebih banyak dikategori *fighter*, *bomber*, ataupun FGA, dari pada kategori lainnya, seperti *transport* dan *training*. Mengingat pula bahwa aplikasi *grand strategy* tersebut pada tahap awalnya masih menerapkan prinsip *inside, outside we are dove* (*Media Indonesia*, 20/03/2007), maka komposisi yang dimiliki USAF dapat digunakan sebagai dasar menyusun postur ideal TNI AU. *Ketiga*, mempertimbangkan kebutuhan alutsista 112 skuadron tempur yang telah dirumuskan. *Terakhir*, berdasarkan spesifikasi teknologi alutsista udara, dapat diukur dengan membandingkan jenis dan tipe pesa-

wat yang dimiliki negara yang ber-AU kuat, mengingat teknologi AU Asia Tenggara jauh tertinggal dibandingkan dengan Asia Pasifik, terutama, AS, China, dan Rusia.

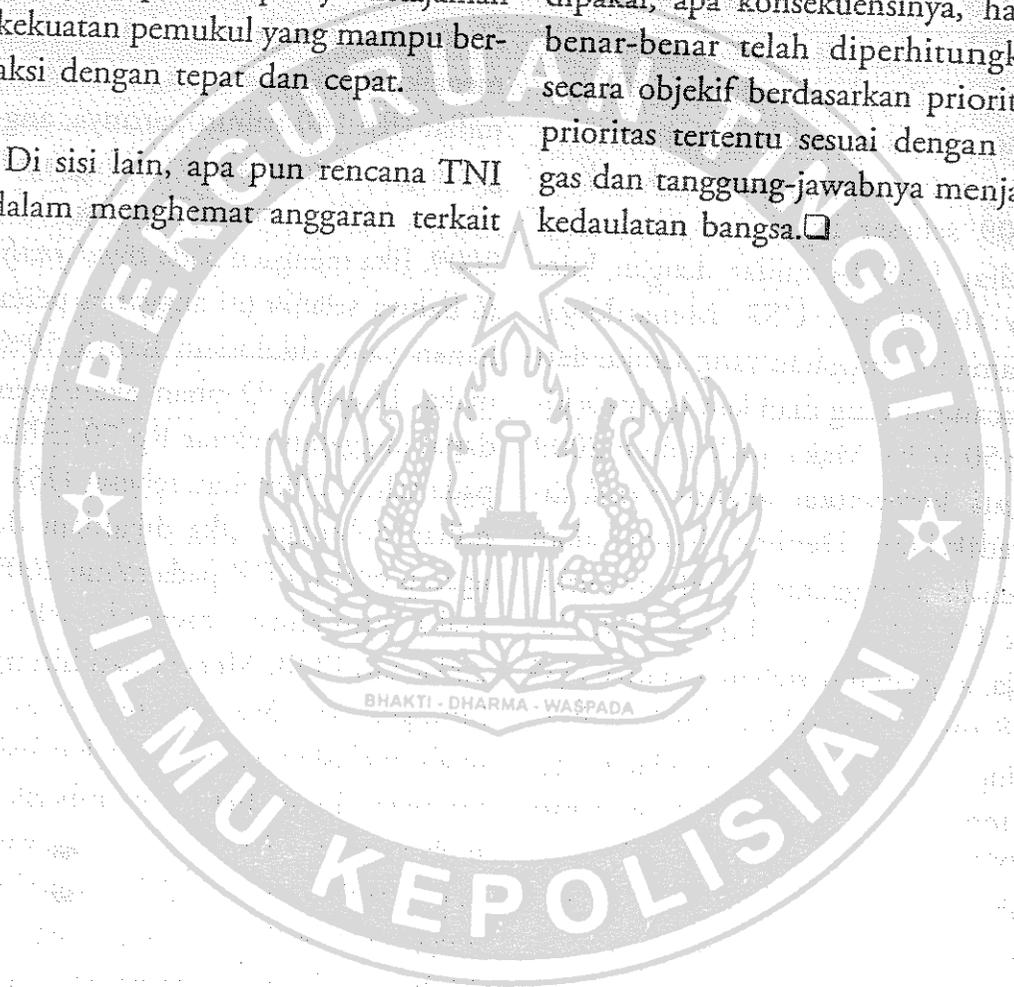
Berdasarkan pertimbangan tersebut, jumlah ideal kekuatan pesawat TNI AU guna memenuhi kebutuhan 112 skuadron tempur, 14 skuadron intai, 18 skuadron angkut dan 4 skuadron *support* dapat ditentukan sebanyak 1.890 unit. Jumlah ini sudah di atas rata-rata Asia Pasifik. Dengan jumlah ideal tersebut, TNI AU akan menjadi kekuatan terbesar di Asia Tenggara dan termasuk enam besar di Asia Pasifik. Mengingat bahwa TNI AU saat ini sudah memiliki pesawat sejumlah 237 unit, maka masih dibutuhkan tambahan sebesar 1.653 unit. Dari jumlah ideal tersebut, mengikuti USAF, pesawat tempur yang harus dimiliki TNI AU sekitar 1.200, untuk *bomber* 60, pesawat intai 140, *tanker* 90 dan *transport* maupun *support* 150, sisanya, *training* 250 di mana 50% *combat capable*.

Dari rumusan ideal 1.200 pesawat tempur, jenis *fighter* sekitar 744 unit dan FGA 456 unit. Mengingat bahwa jumlah *Fighter* TNI AU saat ini ada 26, dibutuhkan tambahan seba-

dan penajaman prioritas kemampuan intelijen strategis di mana mencakup kemampuan teritorial dengan seluruh kemampuan sosial politik dan profesionalisme di setiap bidang sehingga dapat dicapainya ketajaman kekuatan pemukul yang mampu beraksi dengan tepat dan cepat.

Di sisi lain, apa pun rencana TNI dalam menghemat anggaran terkait

dengan penggunaan senjata dengan mengurangi jenis alutsista harus berdasarkan pada pilihan dan perencanaan yang tepat. Mana jenis Alutsista yang tidak dipakai mana yang akan dipakai, apa konsekuensinya, harus benar-benar telah diperhitungkan secara objektif berdasarkan prioritas-prioritas tertentu sesuai dengan tugas dan tanggung-jawabnya menjaga kedaulatan bangsa. □



## Penutup

Usaha pembangunan TNI yang ideal, berwibawa, dan profesional ini akan tercapai jika di mulai dari pimpinan sipil. Sebenarnya, usaha peningkatan jumlah anggaran telah dirintis oleh Menteri Pertahanan, Juwono Sudarsono. Menhan telah merencanakan anggaran pertahanan untuk tahun 2009 sebesar Rp 140 triliun atau sekitar US\$ 14 miliar dengan kurs Rp 10.000 per US\$. Menariknya, selama ini, anggaran yang setuju dari rancangan yang diajukan hanya sekitar 50-60%. Maka, pada tahun 2009 nanti, berdasarkan analisis *trend*, diprediksikan Dephan hanya akan mendapat anggaran pertahanan sekitar US\$ 7 miliar. Tahun 2006 ini saja, anggaran pertahanan hanya US\$ 2,8 miliar dari sekitar Rp 56 triliun yang diajukan. Namun, jika menggunakan perhitungan PDB tahun 2005 sebesar US\$ 251 miliar, untuk tahun 2006 ini, anggaran pertahanan Indonesia sudah mencapai sekitar 1,2% PDB, artinya terdapat peningkatan sekitar 0,3%.

Dengan asumsi pertumbuhan PDB pertahun sebesar 5% (*ceteris paribus*), maka, proyeksi PDB tahun 2009 akan menjadi sekitar US\$ 303,5

miliar. Melihat bahwa jumlah anggaran pertahanan selama ini hanya 1% dari PDB, maka kira-kira pemerintah hanya akan memberikan anggaran sebesar US\$ 3,03 miliar atau sekitar Rp 30 triliun pada tahun 2009. Namun, jika Menhan bersikukuh menaikkan anggaran menjadi US\$ 14 miliar (Rp 140 triliun), artinya, anggaran pertahanan akan naik menjadi sekitar 4,6% dari PDB pada tahun 2009. Jika mengacu pada *trend analysis* bahwa selama ini anggaran pertahanan yang diloloskan hanya 50%, maka, kira-kira Dephan akan mendapat anggaran sekitar Rp 70 triliun pada tahun 2009 atau sebesar US\$ 7 miliar. Sehingga, jika dikaitkan dengan proyeksi PDB pada tahun 2009, maka jumlahnya menjadi sekitar 2,3% dari PDB. Mencermati hitung-hitungan dari Menhan seperti yang telah dijelaskan di atas, terlihat bahwa pemerintah belum memberikan perhatian terhadap persoalan ini, yang dapat dilihat dari rendahnya alokasi anggaran pertahanan yang disetujui. Maka, perlunya pemerintah sipil untuk memikirkan kembali peningkatan anggaran pertahanan dan dalam selang antara untuk mencapai anggaran pertahanan negara yang seharusnya dicapai, maka yang paling diperlukan adalah membangun sistem